

Implementasi Geo-KKP Sebagai Penerapan *E-Government* di BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I

Mohamad Zein Surya Pandega^{1*}, Syahrul Rivaldi¹, Silmi Afina Aliyan²

¹Program Studi Survey Pemetaan dan Informasi Geografis, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

²Program Studi Sains Informasi Geografi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Email : ^{1*}zens@upi.edu, ²syahrulrivaldi@upi.edu, ³aliyan.silmi@upi.edu

(*: corresponding author)

Abstrak– Pada tahun 2010, Kementerian ATR/BPN meluncurkan sebuah sistem administrasi pertanahan yang dikenal dengan nama Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), kemudian mengalami perkembangan dan berubah nama menjadi Geo-KKP, dimana sistem ini memungkinkan integrasi antara data tekstual dan spasial dan mampu meminimalisir kesalahan dalam pemetaan. Data tekstual adalah data yang berbentuk teks yang menjelaskan kondisi fisik tanah, seperti letak, lokasi, keadaan tanah, dan luas tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kendala apa saja yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor I dalam Penerapan Geo-KKP untuk melakukan validasi data tekstual dan Geo-KKP sebagai pengaplikasian *E-Government* di BPN Kabupaten Bogor I. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif menggunakan pengumpulan data berupa studi literature dan wawancara terhadap narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses digitalisasi sudah berjalan dengan semestinya, didukung dengan ketersediaan alat dan sumber daya yang mumpuni di bidangnya. Akan tetapi, dalam implementasinya, masih terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya sumber daya yang mencukupi untuk melakukan digitalisasi, sehingga terjadi penumpukan berkas fisik.

Kata Kunci: Geo-KKP, Kementerian ATR/BPN, Pemerintahan Elektronik, Implementasi Kebijakan

Abstract– In 2010, the Ministry of Agrarian Affairs/National Land Agency launched a land administration system known as the Computerized Land Office (KKP), then underwent development and changed its name to Geo-KKP, where this system allows integration between textual and spatial data and is able to minimize error in mapping. Textual data is data in the form of text that describes the physical condition of the land, such as location, location, land condition, and land area. The purpose of this study was to analyze what obstacles were faced by the National Land Agency of Bogor Regency I in implementing Geo-KKP to validate textual data and Geo-KKP as an application of *E-Government* at BPN Bogor Regency I. The method used in this study was the Qualitative research uses data collection in the form of literature studies and interviews with informants. The results of the study show that the digitalization process is running as it should, supported by the availability of qualified tools and resources in their fields. However, in its implementation, there are still several obstacles, namely the lack of sufficient resources to digitize, resulting in an accumulation of physical files.

Keywords: Geo-KKP, Ministry of ATR/BPN, Electronic Government, Policy Implementation

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini penggunaan teknologi mulai berkembang pesat dan dapat dijumpai dimana-mana, salah satu yang dapat kita jumpai adalah sistem informasi manajemen yang sekarang digunakan di berbagai instansi pemerintah, pemerintah saat ini berupaya melaksanakan pelayanan prima dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang pertanahan, melihat banyaknya masalah pertanahan yang terjadi, ATR/BPN membuat Sistem Informasi Pertanahan (SIP) sebagai upaya manajemen administrasi pertanahan dan penyajian informasi pertanahan. Sistem Informasi Pertanahan (SIP) adalah sarana atau perangkat untuk pengambilan keputusan baik yang bersifat legal, administrasi dan ekonomi serta membantu untuk perencanaan dan pembangunan. SIP terdiri dari data spasial yang telah terreferensi dan data atribut bidang tanah. Keberadaan SIP juga untuk mendukung mewujudkan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) (Nugraha et al., 2021).

Berkaitan dengan Sistem Informasi Pertanahan, Kementerian ATR/BPN memiliki peran sebagai penyedia layanan informasi pertanahan seperti status tanah, pendaftaran tanah, konflik dan sengketa tanah. Permasalahan tanah terjadi karena ketidaksesuaian dalam administrasi pertanahan yang belum valid dan akurat. Oleh karena itu Kementerian ATR/BPN ditahun 2010 meluncurkan sebuah sistem administrasi pertanahan yang dikenal dengan nama Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), yang merupakan evolusi dari sistem *Land Office Computerization (LOC)* yang diterapkan di tahun 1997. Pada perkembangan selanjutnya, KKP berubah nama menjadi Geo-KKP, dimana sistem ini memungkinkan integrasi antara data tekstual dan spasial dan mampu meminimalisir kesalahan dalam pemetaan. (Pinuji, 2016). Pada dasarnya Geo-KKP hampir sama dengan KKP, hanya saja dalam Geo-KKP lebih menekankan pada inventarisasi data spasial bidang tanah (pemetaan bidang tanahnya). Geo-KKP diterapkan dalam kegiatan pendaftaran tanah baik pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah. Tujuan dari Geo-KKP adalah untuk menyusun data spasial pertanahan yang terintegrasi dan terstandar sehingga memudahkan dalam pengelolaan informasi pertanahan (Satriya et al., 2014). Geo-KKP menjadi sistem pengumpulan data tekstual dan spasial dalam bentuk digital sebagai upaya pemerintah untuk melakukan digitalisasi data.

Data tekstual adalah data yang berbentuk teks yang menjelaskan kondisi fisik tanah, seperti letak, lokasi, keadaan tanah, dan luas tanah. Sedangkan data spasial merupakan data vektor yang berupa garis yang memiliki arah dan panjang, dalam data spasial juga dapat terlihat bentuk bidang tanah yang sudah tergeoreferensi lokasi bidang tanah tersebut. Aplikasi ini hanya digunakan oleh pegawai fungsional bidang infrastruktur Badan Pertanahan Nasional karena perlunya memasukan ID dan Password ketika ingin digunakan (Haryani & Frinaldi, 2020). Data tekstual dan spasial dapat dilihat dari Surat Ukur atau Gambar Situasi yang nantinya dimasukan kedalam sistem Geo-KKP, dan setelah masuk kedalam sistem perlu dilakukan validasi kembali untuk memastikan bidang tersebut telah *clear* atau tidak ada masalah.

Pengaplikasian Geo-KKP juga merupakan salah satu penerapan pemerintahan elektronik atau *E-Government*, *E-Government* merupakan sebuah kebijakan dimana pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk melayani penduduknya melalui media telepon, *faximile*, atau *email*/internet (Almarabeh & AbuAli, 2010). Jadi dengan adanya aplikasi Geospasial Komputerisasi Kantor Pertanahan (Geo-KKP) dapat mewujudkan tertib administrasi pertanahan sebagai upaya untuk mengurangi permasalahan tanah yang terjadi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kendala apa saja yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor I dalam Penerapan Geo-KKP untuk melakukan validasi data tekstual dan Geo-KKP sebagai pengaplikasian *E-Government* di BPN Kabupaten Bogor I

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif menggunakan pengumpulan data berupa studi literatur dari berbagai sumber seperti jurnal, berita, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka (Fadli, 2021). Model analisis data kualitatif mempunyai tiga alur kegiatan yaitu pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hal tersebut, akan diperoleh deskripsi tentang evaluasi proses, kendala, serta potensi peningkatan kualitas data (Pratama & Santoso, 2021).

2.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang di terbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian (Yusra et al., 2021). Observasi merupakan suatu pengamatan atau teknik yang dilakukan dengan mengadakan suatu pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis (Khaatimah & Wibawa, 2017). Wawancara adalah situasi berhadapan-hadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan, dan mendapatkan data tentang responden, dengan tujuan yang telah

ditentukan sebelumnya, bersifat serius, yang dirancang agar tercipta interaksi yang melibatkan aktivitas bertanya dan menjawab pertanyaan (Hakim, 2013) pada penelitian ini peneliti memilih mengumpulkan data menggunakan metode diatas untuk membantu peneliti melakukan pengamatan terhadap kejadian di lapangan dan untuk menjawab permasalahan pada penelitian.

2.3 Lokasi Penelitian

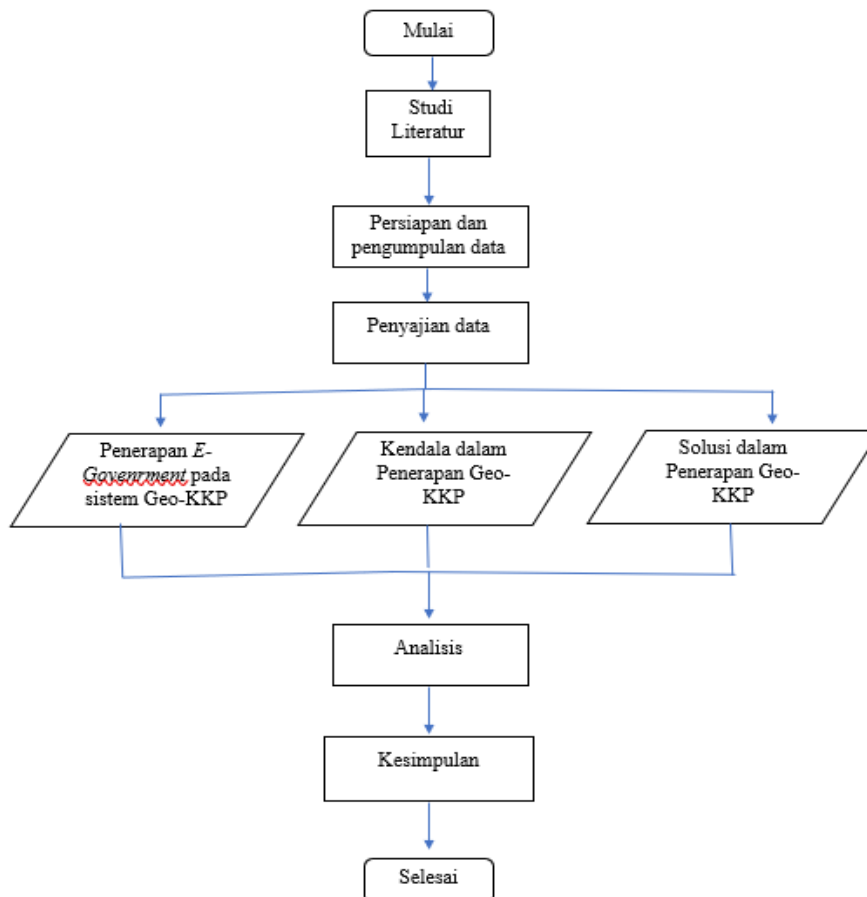
Penelitian ini dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Penelitian ini menggambarkan keadaan yang ada di lapangan berdasarkan data terkait pengaplikasian sistem Geospasial Komputerisasi Kantor Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor I.

2.4 Ruang Lingkup

Terkait penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada informan yang memiliki dasar pengetahuan terkait penggunaan sistem Geo-KKP sebagai penerapan *E-Government* di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor I.

Implementasi Sistem Geo-KKP pada penelitian ini akan dilihat menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn (Siregar, 2022) yang merumuskan implementasi kebijakan menjadi 6 variabel diantaranya:

- a. Standar dan Sasaran Kebijakan.
- b. Sumber Daya
- c. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan.
- d. Karakteristik Badan Pelaksana.
- e. Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik.
- f. Disposisi Implementor



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

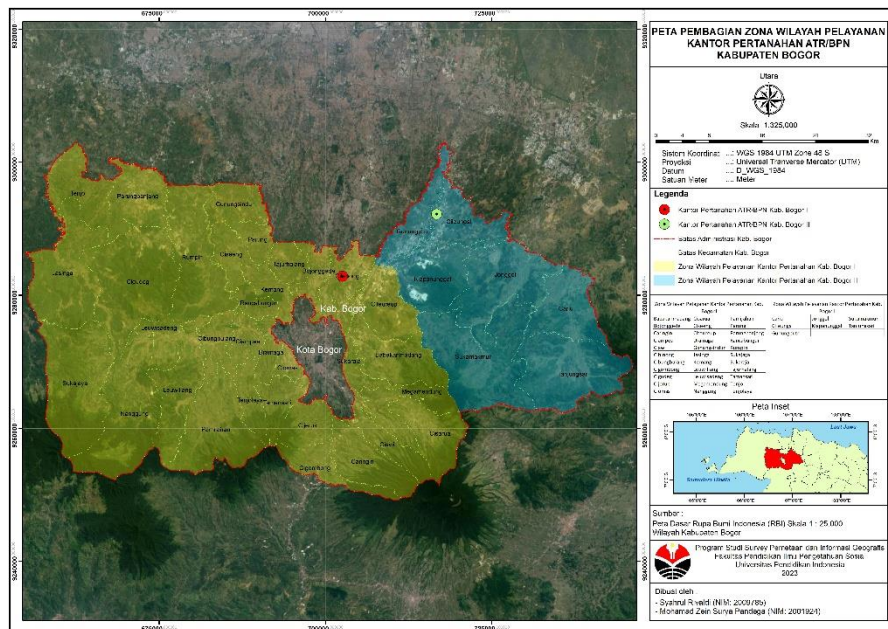
3.1 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji informasi dari artikel atau jurnal yang berkaitan dengan pemerintahan elektronik, Geo-KKP, dan Kementerian ATR/BPN. E-Government adalah sebuah reformasi atau paradigma baru dari pelaksanaan pemerintahan yang mengacu kepada keterbukaan informasi publik yang memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berlangsung. (Mahdanisa & Nurlim, 2018). dalam Kementerian ATR/BPN penerapan E-Government pada Sistem Geo-KKP adalah untuk kerapihan administrasi pertanahan untuk memastikan bahwa setiap bidang tanah sudah memiliki kepemilikan dan mengatasi permasalahan dalam Kepemilikan ganda atau *overlapping* bidang.

3.2 Wilayah Pelayanan BPN Kabupaten Bogor I

Kabupaten Bogor merupakan salah satu Kabupaten terluas di Jawa Barat dengan luas 2.710,62 km². Kabupaten bogor juga menjadi salah satu wilayah penyangga Ibu kota yang berbatasan langsung dengan Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Wilayah yang luas tersebut terdapat 2 kantor BPN di Kabupaten Bogor, yaitu BPN Kabupaten Bogor I dan BPN Kabupaten Bogor II

Pada kedua kantor BPN tersebut terdapat pembagian Zona Wilayah untuk Pelayanan kepada masyarakat, BPN Kabupaten Bogor I melakukan pelayanan di daerah Bogor Tengah hingga Bogor Barat sementara BPN Kabupaten Bogor II melakukan pelayanan di wilayah Bogor Timur.



Gambar 2. Peta Pembagian Zona Wilayah Pelayanan Kabupaten Bogor

Terlihat pada gambar diatas untuk yang berwarna biru adalah wilayah pelayanan BPN Kabupaten Bogor II dan yang berwarna kuning adalah wilayah Pelayanan BPN Kabupaten Bogor I. Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis di Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Bogor I

3.3 Analisis Implementasi Geo-KKP sebagai penerapan E-Government di BPN Kabupaten Bogor I

Analisis dilakukan dengan metode wawancara dan observasi, dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai pegawai yang bertugas melakukan digitalisasi Surat Ukur pada Sistem Geo-KKP, wawancara meliputi variabel dalam implementasi kebijakan dilihat menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn. Rekapitulasi wawancara ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Wawancara Bersama Narasumber

Variabel	Pertanyaan	Jawaban
Standar dan Sasaran Kebijakan	Apakah proses digitalisasi di kantah Kab. Bogor I sudah sesuai dengan standar dan kebijakan?	Untuk standar yang jelas sesuai dengan alat saja, yang penting saat di upload dapat terbaca
Sumber Daya	Sumber daya yang ada di kantah Kab. Bogor I apakah sudah sesuai dan mencukupi?	sumber daya sebetulnya perlu dilihat dari outputnya juga, dan diperhatikan dari kemampuan tiap individunya, kemampuan sehari seorang dapat melakukan upload hingga 200 SU, sebaiknya diperlukan 3 orang, tetapi hanya ada 1 orang yang bertugas melakukan upload SU
Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan	Bagaimana pelaksanaan komunikasi di kantah Kab. Bogor I?	Saya hanya memberikan Harddisk saya untuk selanjutnya dimasukan file yang akan di digitalisasi
Karakteristik Badan Pelaksana	Bagaimana Standar Operasional yang dilakukan di Kantah Kab.Bogor I?	SOP yang pasti tidak ada, karena hanya scan dan upload, hanya untuk SOP itu dokumen hasil scan yang diberi nama sesuai dengan format penamaan agar mempermudah untuk uploadnya
Kondisi Sosial Ekonomi Politik	Bagaimana Lingkungan Kerja dan Pelayanan di Kantah Kab.Bogor?	lingkungan kerja juga mendukung dan memadai seperti alat scan yang sudah tersedia, web Geo-KKP yang memang bagus dan lancar, juga orang-orang yang mengerjakan digitalisasi adalah orang yang memang mengerti cara digitalisasi
Disposisi Implementor	Bagaimana sikap Kantah Kab.Bogor I sebagai pelaksanaan kebijakan ?	Yang pastinya menerima, karena memang sesuai dengan apa yang kantor butuhkan yaitu digitalisasi data untuk menghemat ruang.

Berdasarkan hasil temuan dari wawancara dan observasi peneliti didapatkan hasil yaitu:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil temuan dari wawancara dan observasi peneliti didapatkan hasil yaitu:

Standar dan sasaran kebijakan perlu jelas agar dapat di realisasi. Berdasarkan hasil penelitian, untuk sasaran kebijakan dalam penelitian ini adalah ATR/BPN Kantah Kabupaten Bogor I, untuk standar kebijakannya dari pusat memberikan standar untuk digitalisasi dengan jelas.

Berdasarkan hasil wawancara standar kebijakannya sudah jelas dan untuk prosesnya hanya perlu terbaca agar memudahkan di upload untuk digitalisasi arsip pertanahan.

b. Sumber Daya

Sumber daya juga menjadi hal terpenting karena dengan sumber daya yang baik dan berkualitas akan membuat implementasi kebijakan ini berjalan baik pula, hasil yang ditunjukkan di lapangan berupa kurangnya sumber daya dari segi kuantitasnya,

Berdasarkan Temuan di lapangan, didapatkan bahwa masih kurangnya sumber daya manusia untuk menjalankan digitalisasi Surat Ukur, tanpa adanya sumber daya yang cukup implementasi kebijakan tersebut dapat terhambat, sehingga menjadi tidak efektif untuk kedepannya.

c. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi merupakan komponen penting terutama dalam melaksanakan implementasi kebijakan, jika tidak adanya komunikasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan, komunikasi yang efektif terjadi jika informasi yang disampaikan diberikan secara jelas dan yang menerima informasi juga paham akan informasi yang disampaikan.

Berdasarkan hasil temuan didapat bahwa, untuk komunikasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I dilakukan secara tidak langsung, tetapi proses digitalisasi tetap dapat berjalan, karena setiap individu sudah memiliki tugasnya masing-masing.

d. Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik tidak lepas dari birokrasi yang terjadi dalam badan penyelenggara, birokrasi juga berperan signifikan, di dalamnya terdapat standar operasional sebagai pedoman untuk melaksanakan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil temuan dari wawancara, untuk standar oprasional yang dilakukan hanya membuat format nama dengan sesuai agar mempermudah digitalisasi, karena proses digitalisasi ini tidak memiliki SOP yang mengikat.

e. Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik

Dalam poin ini dilihat sejauh mana kelompok kepentingan memberi dukungan atas kebijakan, seperti dilihat dari lingkungan kerjanya.

Dari hasil temuan, untuk kondisi lingkungan di Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I sudah cukup mendukung untuk melaksanakan kebijakan digitalisasi.

f. Disposisi Implementor

Implementor mencangkup tiga hal, yaitu : (1) Respons Implementor terhadap kebijakan yang akan dijalankan (2) Kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan (3) Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki implementor. Dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor I sendiri bersikap menerima kebijakan tersebut, karena memang hal tersebut juga yang dibutuhkan untuk tertib administrasi

Berdasarkan hasil temuan, terlihat bahwa kebijakan pemerintah memang cocok dengan keadaan yang diperlukan yaitu digitalisasi agar dapat menghemat ruang. Tetapi masih banyak berkas fisik yang belum terdigitalisasi dan masih menumpuk.

3.4 Pembahasan

Pada awalnya melakukan studi kepustakaan, pada tahap ini melakukan kajian terhadap jurnal dan artikel mengenai pemerintahan elektronik dan Geo-KKP, hal ini dilakukan untuk melihat kesesuaian penerapan Geo-KKP sebagai bentuk *E-Government*. Lalu dilakukan survei lapangan berupa wawancara kepada Pegawai BPN Kabupaten Bogor I yang bertugas untuk melakukan digitalisasi Surat Ukur untuk mengetahui kondisi di lapangan.

Hasil dari temuan studi kepustakaan ditemukan bahwa penerapan E-Government pada Sistem Geo-KKP sudah tepat karena tujuan Geo-KKP adalah untuk kerapihan administrasi pertanahan yang dimana dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kepemilikan setiap bidang tanah dan mencegah terjadi sengketa dari bidang tanah. Sedangkan dari pengumpulan data didapatkan temuan, penerapan digitalisasi dengan Geo-KKP di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor I sudah berjalan dengan semestinya, baik secara perangkat/alat sudah memadai maupun kemampuan dari setiap individu yang ditugaskan pada bagian digitalisasi.

Akan tetapi, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti sumber daya manusia yang belum mencukupi untuk melakukan digitalisasi, hal ini terlihat dari temuan saat pengumpulan data dimana hanya ada sedikit orang dalam melakukan digitalisasi sementara masih banyak berkas yang perlu di digitalisasi, akibatnya terjadi penumpukan berkas yang perlu untuk dilakukan digitalisasi karena ketersediaan sumber daya tidak sebanding dengan pemasukkan berkas oleh pemohon pada setiap harinya. Kendala lainnya adalah dari komunikasi, untuk komunikasi dari pegawainya hanya dilakukan secara tidak langsung, sehingga tidak banyak informasi yang disampaikan, jika memang ada berkas yang kurang baik atau sulit dibaca yang mengakibatkan terhambatnya proses digitalisasi akan sulit diketahui jika komunikasinya hanya secara tidak langsung. Solusi yang dapat diberikan untuk kendala sumber daya adalah penambahan sdm untuk tugas digitalisasi sehingga dapat mempercepat dalam kerapihan administrasi secara digital, sedangkan untuk komunikasi, informasi yang disampaikan dapat dilakukan secara langsung seperti diberitahu terlebih dahulu untuk berkas-berkas yang sekiranya akan sulit terbaca untuk dilakukan digitalisasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Digitalisasi di Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, bahwa untuk wilayah pelayanannya Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I terdapat 33 kecamatan meliputi Babakanmadang, Bojonggede, Caringin, Ciampea, Ciawi, Cibinong, Cibungbulang, Cigombong, Cigudeg, Cijeruk, Ciomas, Cisarua, Ciseeng, Citeureup, Dramaga, Gunungsindur, Jasinga, Kemang, Leuwiliang, Leuwisadeng, Megamendung, Nanggung, Pamijahan, Parung, Parungpanjang, Rancabungur, Rumpin, Sukajaya, Sukaraja, Tajurhalang, Tamansari, Tenjo, Tenjolaya. lalu dalam implementasi kebijakan dari sistem Geo-KKP masih ada beberapa yang belum berjalan dengan baik, seperti dalam data berkas yang masih menumpuk dalam bentuk fisik dan sumber daya manusia yang kurang dalam melakukan digitalisasi. Hal ini terlihat dari pernyataan saat wawancara dengan narasumber dimana hanya ada satu orang yang melaksanakan pekerjaan digitalisasi. Ada juga upaya yang dapat dilakukan BPN Kabupaten Bogor I seperti menambah sumber daya manusia untuk mempercepat proses digitalisasi, dapat juga di pilih mana data yang perlu di digitalisasi terlebih dahulu agar tidak terlalu banyak data yang menumpuk. Tetapi dalam proses digitalisasi semuanya sudah sesuai, untuk alat juga sudah tersedia dan mendukung dalam melakukan proses digitalisasi, hanya karena banyaknya permohonan yang ada setiap harinya menjadikan berkas yang perlu digitalisasi menjadi banyak, karena itulah perlu adanya sumber daya yang mencukupi agar proses digitalisasi dapat berjalan dengan lancar.

REFERENCES

- Almarabeh, T., & AbuAli, A. (2010). A general framework for E-government: Definition maturity challenges, opportunities, and success. *European Journal of Scientific Research*, 39(1), 29–42.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hakim, L. N. (2013). Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit. *Aspirasi*, 4(2), 165–172. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/501>
- Haryani, D., & Frinaldi, A. (2020). Implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi dalam Upaya Tertib Administrasi Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian ...*, 3(4), 687–698. <http://perspektif.ppj.unp.ac.id/index.php/perspektif/article/view/346>
- Khaatimah, H., & Wibawa, R. (2017). Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition Terhadap Hasil Belajar. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 2(2), 76–87.
- Mahdanisa, D., & Nurlim. (2018). Analisis Penerapan E-Government Dalam Pencapaian Sistem Informasi Pada (Dinas Kominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara. *Gerbang Etam*, 12(25), 50–60.
- Nugraha, F. A., Muryono, S., & Utami, W. (2021). Membangun Sistem Informasi Penggunaan Tanah Berbasis Bidang Tanah di Desa Blimbing Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. *Tunas Agraria*, 4(1), 146–157. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.140>
- Pinuji, S. (2016). Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2(1), 48. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i1.31>
- Pratama, R. A., & Santoso, K. B. (2021). Peningkatan Kualitas Data Sertipikat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Prosiding Forum Ilmiah ...*, 1, 276–282. <http://proceedings.undip.ac.id/index.php/isiundip2021/article/view/622%0Ahttp://proceedings.undip.ac.id/index.php/isiundip2021/article/viewFile/622/361>
- Satriya, P., Sudarsono, B., & Sasmito, B. (2014). Kajian Efektivitas Pemanfaatan Sistem Geokkp Untuk Penerbitan Sertipikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Geodesi Undip*, 3(2), 53–68.
- Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pka). *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(Query date: 2022-09-13 08:36:55), 713–722. <https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3320>
- Yusra, Z., Zulkarnain, R., & Sofino, S. (2021). Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19. *Journal Of Lifelong Learning*, 4(1), 15–22. <https://doi.org/10.33369/joll.4.1.15-22>